

**UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
DI KOTA SEMARANG**

TESIS



Disusun Oleh :

RIEFKI ADIAN, SH

B4B 006 208

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :
RIEFKI ADIAN,SH
B4B006208

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 24 Mei 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui
Dosen Pembimbing :

A. Kusbiyandono, SH., M.Hum.
NIP. 130 810 115

Mengetahui
Ketua Program :

Mulyadi, SH., MS.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Mei 2008

RIEFKI ADIAN, SH.

KATA PENGANTAR

Assalaamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan nikmat tak terhingga serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : “UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG.”

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan kemurahan hati telah begitu banyak memberi kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.

2. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Budi Ispiyarso, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan.
4. Bapak A. Kusbiyandono, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak H. R. Suharto, SH., M.Hum., selaku dosen wali yang telah membantu mulai dari awal penulisan tesis hingga keberhasilan penulisan tesis ini.
6. Bapak Suyanto, SH., selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang yang telah banyak memberikan waktunya, kesempatan dan masukan atas penulisan tesis ini.
7. Bapak Hari Bagyo, SH., M.Hum., selaku anggota Ikatan Notaris Indonesia yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sugiarti yang dengan sabar memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tesis ini.
9. Kakakku Arief Rizal yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.
10. Sahabat-sahabatku : Citra, Rey, Yudi, Om Deni, Koko, Anam, Agus, Deny, Made, Irin dan teman-teman yang lain yang telah banyak membantu dari awal kuliah sampai keberhasilan penulisan tesis ini.

11. Segenap rekan-rekan mahasiswa/i Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (angkatan 2006) yang telah begitu banyak membantu, memberi dorongan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

12. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalaamu alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2008

Penulis

ABSTRAK

Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) diangkat dan disertai otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh Negara sehubungan cita mewujudkan kepastian Hukum dalam interaksi–interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian Hukum pasti tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu tata interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah menerapkan nilai-nilai kepastian Hukum dan keadilan. Jabatan Notaris merupakan jabatan publik. Masyarakat meletakkan kepercayaan dipundak Notaris selaku pejabat umum yang kompeten dalam pembuatan akta otentik. Konsukwensinya jabatan Notaris dijalankan dengan mengingat keluhuran martabat / jabatan yang menuntut pertanggungjawaban serta integritas moral seorang Notaris. Alasan penyelamatan / pengamanan kepentingan publik (*interest public security*) menjadi kata kunci keberadaan sanksi-sanksi jabatan Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan upaya Hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dan perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang dikenai sanksi jabatan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat dapat melakukan upaya Hukum dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif.

Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan mendapatkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota Organisasi.

Kata Kunci : Upaya dan perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan

ABSTRACT

Notary is a term used for identifying a group of people by the public authorization (*openbaar gezag*) that is promoted and authorized to establish written evidence of the authentic certificate. The position of Notary is the position in which the existence is expected by the State in order to realize the Law certainty upon the civil interaction. The conception of the Law certainty has been reflected upon the life within the social and state. An interaction order either public or private has to apply the value of the law and justice certainty. The Notary position is a public position. The society puts the trust to the Notary as the public officer competent of establishing the authentic certificate. As the consequence, the Notary position is executed by considering the prestige level / position that needs moral responsibility and integrity of the Notary. The reason of safety / the public interest security is the key of the Notary position sanctions existence.

Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are : How is the execution of lawful efforts for the notary experiencing positional sanctions and lawful protections for the Notary by the Regional Supervisory Council and Notary Organization (Indonesian Notary Union / Ikatan Notaris Indonesia) in case of positional sanctions are applied to its members.

The used method of approach is the juridical-empirical approach and the used specification in this research is the descriptive-analytical research.

Based on the research results, it can be concluded that the Notary experiencing positional sanctions in form of verbal reprimands, written reprimands, temporarily dismissed, dismissed with honor and dismissed with dishonor may perform lawful efforts in form of self-defense and administrative appeals.

The Notary experiencing positional sanctions does not receive lawful protections from the Regional Supervisory Council because it only has the function of supervisor and observer; however, for the Notary experiencing positional sanctions receives lawful protections from the Notary Organization (Indonesian Notary Union) as long as that Notary is still active as the member of organization.

Key Words : Efforts and lawful protections for the Notary against positional sanctions

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	9
B. Tinjauan Tentang Sanksi-Sanksi Jabatan Notaris	21
C. Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Notaris ...	23
1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)	25
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	27
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)	29
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan Yang Digunakan	37
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Populasi dan Metode Penarikan Sampel	39
D. Lokasi Penelitian	40
E. Metode Pengumpulan Data	40

F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1. Pelaksanaan Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Dikenai Sanksi Jabatan Di Kota Semarang	44
a. Pembelaan Diri	48
b. Banding Administratif	50
2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) Dalam Hal Anggotanya Dikenai Sanksi Jabatan.....	54
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkat kebesaran dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Agung dan Maha Adil maka melalui Proklamasi lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat, berdasarkan Hukum menuju cita-cita terwujudnya masyarakat yang merdeka, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam rangka menyelenggarakan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi tersebut mutlak diperlukan adanya institusi atau organ-organ dan / alat perlengkapan Negara. Melalui institusi organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan itulah Negara memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Untuk lebih memberikan kepastian agar institusi atau organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut berfungsi secara benar, proporsional, efektif dan efisien serta mengingat NKRI adalah Negara yang berdasar Hukum, maka keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab institusi, organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan Negara tersebut diatur dengan Undang-Undang yang mengacu pada sistem Hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita

Proklamasi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut sistem Hukum Indonesia, organ-organ dan / atau alat-alat perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah :¹

1. Institusi Peradilan dengan Pengadilan dan aparatnya sebagai Hakim atau Majelis Hakim, yaitu :

Organ Negara yang memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan, berkenaan dengan perkara atau sengketa yang sedang dihadapi, yang penyelesaiannya memerlukan putusan Pengadilan.

Pelayanan kepada masyarakat dibidang Peradilan ini diberikan oleh Negara khususnya Pengadilan menurut kasusnya dapat dilakukan berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat dan Hukum Agama.

2. Institusi Pemerintah dengan Pejabat Pemerintahan / Eksekutif, yaitu :

Organ Negara yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan Hukum Publik.

Yang dimaksud dengan Pemerintah atau Pejabat Pemerintahan / Eksekutif antara lain adalah mulai dari Presiden dan pembantu-pembantu nya yaitu para Menteri dan segenap aparatnya sampai ke tingkat yang

¹ NG. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya*, Makalah disampaikan pada Kongres INI pada tanggal 25 Januari 2006 di Jakarta.

paling bawah termasuk didalamnya Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Institusi Legislatif atau Perwakilan Rakyat, yaitu :

Organ Negara dengan tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab antara lain dalam bidang Legislasi, pembuatan Undang-Undang dari melakukan pengawasan umum atas kinerja Eksekutif, sedangkan hal-hal yang bertalian dengan keuangan Negara, pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Organ Negara lain, yaitu :

Notaris sebagai Pejabat Umum, yaitu Organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan Hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan Hukum dibidang keperdataan saja.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas – kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang Keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian Akta.

Pluralitas organisasi notaris dan draft RUU Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pengganti Peraturan Jabatan Notaris, (Ordonansi 11 Januari 1860 L.N 1860 No. 30), menandai perjalanan perkembangan lembaga kenotariatan memasuki pertengahan tahun 2004. Polemik di seputar kedua isu krusial

tersebut masih saja menghiasi proses panjang perguliran gagasan keanekaan organisasi notaris dan RUU PJJN (tanggal 6 September disahkan menjadi UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004).

Kalangan notaris yang terintegrasi solid dalam keorganisasian Ikatan Notaris Indonesia, di usia ke-99 tahun organisasi, sejak didirikan tanggal 1 Juli 1908, dikejutkan oleh kehadiran organisasi notaris lain. Organisasi di luar keorganisasian Ikatan Notaris Indonesia ini memiliki konsep dan visi yang sama. Sebutlah di antaranya Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), Perhimpunan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), Himpunan Notaris Indonesia (HNI). Gagasan pluralitas kelak apakah merupakan suatu pilihan tepat atau bahkan sebaliknya, bergantung kepada proses akhir atau finalitas pergulatan polemik.

Di sudut lain, dunia kenotariatan pada saat itu tengah menunggu proses pengesahan RUU PJJN. Menurut rencana akan disahkan setelah rangkaian tahapan pemilihan umum yang berakhir pada bulan Agustus 2004 selesai (kini UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004). Isu RUU PJJN juga mengundang banyak perhatian kalangan kenotariatan. Selain memuat ketentuan-ketentuan lama dan modifikasi, RUU PJJN, juga memuat ketentuan yang mengubah secara signifikan performa lembaga kenotariatan, misalnya saja perubahan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris oleh Menteri (Pasal 2 UUJN). Ketentuan ini memperlihatkan perubahan konstelasi kelembagaan notariat di Indonesia.

Ide penelitian yang mengambil tema Upaya dan Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan, tepat berada di antara himpitan dua fenomena krusial kenotariatan, fenomena keanekaan organisasi notaris dan UU Jabatan Notaris. Kajian tentang persoalan upaya dan perlindungan hukum bagi notaris memang sejak 1 dekade terakhir menjadi topik menarik untuk dibahas, di tingkat organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), di forum-forum akademik maupun dalam format karya akademik berupa buku.

Liliana Tedjosaputro, Paulus Effendie Lotulung, Sugeng Santoso, Winanto Wiryomartani, merupakan sederet nama yang telah lebih dahulu melakukan pengkajian mengenai Perlindungan Hukum bagi Notaris. Sebagai tindak lanjut pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2004 bertempat di Auditorium Hotel Santika Yogyakarta, diselenggarakan perhelatan akademik Semiloka dengan topik Aspek Pidana Yang Dihadapi Notaris Dan PPAT Dalam Pelaksanaan Jabatan. Perlindungan Hukum walau bukan lagi tema yang sama sekali baru, namun pembahasan perlindungan Hukum bagi Notaris umumnya berkaitan dengan aspek Hukum Pidana, sementara upaya dan perlindungan Hukum bagi Notaris dalam konteks sanksi-sanksi UUJN sama sekali belum tersentuh.² Di titik inilah penelitian penulis mengenai upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan menemukan signifikansinya dalam hal seorang Notaris yang bertempat berkedudukan / tinggal di dalam daerah Hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan.

² Liliana Tedjosaputro, *Aspek Pidana Yang Dihadapi Notaris Dan PPAT Dalam Pelaksanaan Jabatan*, Seminar disampaikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2004.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bab, yang masing-masing terbagi lagi kedalam sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, pembatasan masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang mengemukakan mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan tentang sanksi-sanksi jabatan Notaris, tinjauan tentang lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris serta tinjauan tentang perlindungan hukum bagi Notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan.

BAB III : METODE PENELITIAN, membahas mengenai metode pendekatan yang digunakan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode penarikan sample, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, penelitian dan pokok pembahasan tesis yaitu pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dan perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan.

BAB V : PENUTUP, mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil akhir dalam penulisan Tesis.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Sejarah awal kemunculan lembaga kenotariatan dimulai dari Italia Utara. Dahulunya Italia Utara menjadi pusat aktivitas massif perdagangan abad ke-11 dan ke-12. Perkembangan evolusionernya mencapai puncaknya di Prancis dengan diundangkannya 25 Ventose an XI tanggal 6 Maret 1803. Proses ini merupakan penanda cikal bakal terwujudnya

keseragaman lembaga-lembaga notariat, untuk kemudian bersamaan dengan masa kolonialisasi meluas ke pelbagai Negara. Lembaga notariat oleh penjajah diformalisasi ke dalam sistem hukum negara-negara jajahan.

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.³

Jabatan notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh negara sehubungan dengan cita mewujudkan kepastian hukum dalam lalu lintas interaksi-interaksi keperdataan. Konsepsi kepastian hukum mesti tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu tata interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah merefleksikan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan.

Di wilayah privat / perdata, negara menempatkan notaris sebagai instrument negara / badan negara yang mewujudkan nilai kepastian hukum pada tiap-tiap interaksi yang terjadi di antara subjek-subjek hukum yang ada. Kepada jabatan notaris pemerintah yang mewakili kekuasaan

³ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993) hal. 13

umum menyerahkan sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian / alat bukti.

Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi golongan orang yang oleh kekuasaan umum (*Openbaar gezag*) diangkat dan disertai otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.⁴

Selain itu Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan Hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian Hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.”⁵

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni :⁶

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁴ Malaba A Irsyadul, *Menyoal Ketentuan Magang Kepmenkeh No. 1 tahun 2003*, (www.Hukumonline.Com, 2003)

⁵ Djuhad Mahja, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005) hal. 60

⁶ Ibid, hal. 61

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum.⁷

Notaris bukanlah bagian dari Korps Pegawai Negeri yang tersusun dalam suatu struktur birokrasi dengan pola hubungan yang hirarkis. Notaris di angkat, disumpah dan diberhentikan oleh pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentiannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman. Apabila telah mencapai umur 65 tahun seorang notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh pemerintah. Mengenai batasan umur seorang notaris yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) hal. 159

2004 menambahkan ketentuan tentang dapat diperpanjangnya masa jabatan seorang notaris yang telah berusia 65 tahun dapat diperpanjang masa memangku jabatannya sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Walau pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan juga tidak menerima uang pensiun dari pemerintah, melainkan penghasilannya didapat dari honorarium yang dibayar oleh kliennya.

Notaris sebagai pejabat umum penunjukannya berdasarkan undang-undang. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum sebagaimana kita pahami dalam UUJN adalah turunan imperative dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke-IV Pasal 1868 yang menggariskan ketentuan bahwa pembuatan akta otentik sebagai instrument pembuktian yang memenuhi kualifikasi otentik, haruslah dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat dan dalam format yang telah ditentukan oleh undang-undang secara definitif.

Pekerjaan notaris berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yakni:

a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang (*pekerjaan legal*)

diantaranya :

- 1) Memberi kepastian tanggal ;
- 2) Membuat grosse yang memiliki kekuatan eksekutorial ;
- 3) Memberi keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan; dan
- 4) Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

Pekerjaan legal merupakan tugas sebagai pejabat atau melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan notaris sebagai suatu badan negaran dan oleh karenanya tindakan yang dilakukan mempunyai kekuatan undang-undang.

- b) Pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu (*pekerjaan ekstrallegal*)

Menjamin dan memberi perlindungan dalam hal kepastian hukum, merupakan tipikal pekerjaan ekstrallegal notaris. Kepercayaan diberikan pada notaris guna memperhatikan kepentingan golongan lemah dan kurang mengerti akan beberapa tindakan hukum, misalnya pembuatan surat wasiat dan pembagian warisan. Bentuk perlindungan terhadap semua tindakan hukum yang dipercayakan pada seorang notaris diharuskan dalam bentuk akta otentik.

Peran / fungsi notaris terlihat begitu menonjol dalam tiga bidang kehidupan, yaitu :

- a) Bidang hukum keluarga ;
- b) Bidang hukum waris ;
- c) Bidang hukum perusahaan.

Notaris dalam menjalankan kewenangan terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang antara lain menyebutkan :⁸

⁸ Djuhad Mahja, Op. Cit, hal. 66-67

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan lembaga kenotariatan di Indonesia berada di bawah payung UUJN sebagai peraturan induk. Para notaris selain tunduk pada ketentuan UUJN, juga tunduk pada sejumlah peraturan-peraturan hukum lain, baik peraturan perundang-undangan yang lebih umum, SK Menteri Hukum dan HAM, juga ditambah dengan ketentuan-ketentuan etik organisasi profesi notaris.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :⁹

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

⁹ Ibid, hal. 67

sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

m. Menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
- b. Penawaran pembayaran tunai.
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- d. Akta kuasa.
- e. Keterangan kepemilikan, atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Selain kewenangan dan kewajiban, juga terdapat larangan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :¹⁰

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

¹⁰ Ibid, hal. 69

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Tentang Sanksi-Sanksi Jabatan Notaris

Sanksi merupakan komponen atribut. Di antara sekian banyak kaidah yang berlaku di masyarakat, adanya sanksi yang mengikuti pengaplikasian hukum, membedakan kaidah hukum secara distingtif dengan kaidah-kaidah social lainnya.

Keberadaan sanksi jabatan notaris berimplikasi ganda atau rangkap. Di satu sisi capaian sanksi berdampak internal dan sisi lainnya berdampak eksternal. Dampak internalnya ditandai dengan pembentukan kesadaran terhadap diri notaris bahwa pada saat ia menjalankan kewenangan jabatannya nilai keluhuran martabat dan tanggung jawab selaku pejabat umum harus dijunjung tinggi. Dampak eksternalnya kepentingan publik tetap terjaga baik.

Berdasarkan jenisnya, sanksi-sanksi jabatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 84 UUJN adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 85 UUJN adalah sebagai berikut :

1. Teguran lisan.

2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tentang diberhentikan dari jabatannya dengan hormat dimuat dalam Pasal 8, diberhentikan sementara dari jabatannya dimuat dalam Pasal 9, diberhentikan dengan tidak hormat Pasal 12 dan 13.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemberian sanksi berupa teguran baik lisan maupun tertulis terhadap Notaris atas pelanggaran yang dilakukannya, diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atas hasil pemeriksaan sendiri ataupun atas usulan dan/atau laporan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Sedangkan untuk pemberian sanksi pemberhentian sementara ataupun pemberhentian dengan tidak hormat merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), baik hasil pemeriksaan sendiri ataupun atas usulan dan/atau laporan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004). Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004).

C. Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Notaris

Pada acara pembukaan Kongres dan *Upgrading Refreshing Course* ikatan Notaris di Indonesia di Bandung tanggal 22 Januari 2003, Menteri Kehakiman, Yuzril Ihza Mahendra, dalam sambutannya mengingatkan bahwa dalam draft RUU PJN yang kini tengah disahkan (kini UU No. 30 Tahun 2004), akan terjadi perubahan fundamental khususnya mengenai konstalasi structural lembaga kenotariatan, sebagai respon atas desakan organisasi profesi yang menuntut kemandirian organisasi (*self Governing Body*).¹¹

Bentuk perubahan structural dimaksud salah satunya berkenaan dengan tugas pengawasan yang sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri (PN) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, maka berdasarkan UUNJN digantikan dengan institusi baru pengganti institusi PN yakni Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Gagasan tentang pengawasan dan penindakan terhadap notaris didasarkan pada pertimbangan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan publik (*vetrowenambt*). Masyarakat meletakkan kepercayaan mereka (*public trust*) di pundak notaris selaku pejabat umum yang kompeten dalam pembuatan akta otentik. Konsekuensinya jabatan notaris dijalankan dengan mengingat keluhuran martabat / jabatan yang menuntut

¹¹ www.hukumonline.com

pertanggung jawaban serta integritas moral seorang notaris. Alasan penyelamatan / pengamanan kepentingan publik (*public security*) menjadi kata kunci untuk memahami signifikansi pengawasan dan penindakan.

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹²

Selanjutnya menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹³

Pada waktu sekarang ini setelah diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka pengawasan atas Notaris menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan yang dimaksud Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas yang dimaksud diatas terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD).

¹² Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal. 233

¹³ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal. 53

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggota nya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPD dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPD. Menurut Pasal 70 UUJN Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam satu (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protkol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 UUJN adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan

tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggota nya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPW dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW. Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana tertera dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- e. Memberikan sanksi yang berupa teguran lisan maupun tertulis.

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

- 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
- 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum dan Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Pasal 75 UUJN Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas

Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPP dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP. Dijelaskan dalam Pasal 77 UUJN Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum dan Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 81 UUJN menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan

organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan

Terminology upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum.

Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normative. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan.

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN. Aspek perlindungan hukum bagi notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya : berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Di ranah UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di ranah ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹⁴

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.¹⁵

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa : dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris,

¹⁴ Disarikan dari Majalah **Renvoi** Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hal. 611

¹⁵ *Loc, It.*

Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaaan Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga selaku pelapor, sehingga hasil yang pemeriksaan yang diperoleh secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan

pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku terlapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atas research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁷

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berfikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) hal. 6

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000) hal. 4

yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁸

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum dengan maksud mendekati kebenaran dan memperoleh hasil yang maksimal, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan yang digunakan

Penelitian tentang upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan di Kota Semarang merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.¹⁹

Penelitian lapangan dilakukan guna melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan.

Selama penelitian berlangsung, kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa tidak terdapat kasus pelanggaran tugas dan kewajiban jabatan yang melibatkan seorang notaris, khususnya untuk jenis pelanggaran yang aturannya dirujuk kepada Surat Keputusan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) hal. 36

¹⁹ *Ibid*, hal. 9

Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987_No. : M.04 – PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, sehingga hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan, tak bisa dihindari menjadi empiris.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan penelitian diskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu ruang lingkup yang luas sekaligus memberi batasan-batasan yang tegas. Dideskripsikan dalam penelitian ini secara komprehensif dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pengaturan terhadap upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan. Sifat analitis penelitian ini karena melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan di Kota Semarang. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri, dan kemudian terakhir menyimpulkannya.²⁰

C. Populasi dan metode penarikan sampel

²⁰ *Ibid*, hal 26-27

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan, antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²¹ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. 2 (dua) orang anggota Ikatan Notaris Indonesia atau yang mewakili, dan
2. 2 (dua) orang Notaris yang terkena sanksi administratif atau yang mewakili.

D. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan pusat pengambilan kebijakan di bidang kenotariatan dan lokasi di mana perkembangan lembaga kenotariatan terlihat pesat.

²¹ *Ibid*, hal 196

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dalam melakukan penelitian adalah diperoleh dari:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft interview) dan pengamatan (observasi) dilapangan.²² Wawancara dilakukan dengan anggota Ikatan Notaris Indonesia atau yang mewakili dan Notaris yang dikenai sanksi administratif atau yang mewakili.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²³ Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 1. Bahan-bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b). Statlat Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

²² *Ibid*, hal 10

²³ *Ibid*, hal. 11

- c). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-HT.03.10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris.
 - d). Surat Keputusan Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987_ No. : M.04 – PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.
 - e). Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
 - g). Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
 - h). Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Terdiri dari :
- a). Berbagai bahan kepustakaan mengenai notaris.
 - b). Berbagai bahan kepustakaan mengenai upaya dan perlindungan hukum dan notaris.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁵ yang terdiri dari :
- Bahan hukum tertier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah:
- a). Kamus Hukum.
 - b). Kamus Inggris Indonesia.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 52

²⁵ *Ibid*, hal 52

F. Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif, dengan pengertian antara lain sebagai berikut :

1. Deskriptif

Yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

2. Kualitatif

Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Dikenai Sanksi Jabatan Di Kota Semarang

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu, yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama*, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta

keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.²⁶

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar pada Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti, bahwa dengan tidak adanya persetujuan, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.²⁷

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Akta Otentik, adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.²⁸

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang dimuat dalam Stbl. 1860:3, yang selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁶ Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hal. 63

²⁷ *Loc. It.*

²⁸ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2005), hal. 30

UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, dalam hal sanksi-sanksi jabatan disetiap pasalnya yang keseluruhan berjumlah 92 pasal, nyaris tidak memuat lagi sanksi-sanksi jabatan atas setiap bentuk kelalaian teknis dan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban jabatan notaris. Bentuk sanksi terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 84 dan 85 UU No.30 Tahun 2004, adapun isi dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Notaris diangkat oleh penguasa selaku representasi kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk kepentingan publik. Otoritas para notaris diberikan oleh undang-undang, demi pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris. Karenanya, kewajiban-kewajiban yang diemban notaris, adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib untuk melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan di mana seorang notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas/kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah imperative undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Undang-undang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada jabatan notaris. Setiap jabatan yang disertai pemberian otoritas eksklusif kepadanya, juga diletakkan kepercayaan yang menyangkut diri atau kepentingan perorangan atau masyarakat umum. Tanggung jawab jabatan, otomatis didasarkan pada hukum dan berdasarkan moral/ethic. Seorang notaris, walaupun ia memiliki kecakapan hukum yang baik tanpa dilandasi tanggung jawab dan tanpa internalisasi nilai keluhuran dan martabat jabatannya serta standar etika. Tidak dapat dikatakan telah menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Terminology upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana

untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

Pelaksanaan upaya hukum, bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti selama ini Notaris di Kota Semarang yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya Hukum.²⁹ Adapun bentuk-bentuk upaya hukum tersebut antara lain:

a. Pembelaan Diri

Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengetahui, baik atas pemberitahuan / laporan / pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa seorang Notaris yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka ia melakukan langkah-langkah untuk meneliti kebenarannya.

Validitas laporan/pemberitahuan/pengaduan tidak saja didasarkan pada laporan yang masuk, penentuan valid tidaknya suatu laporan bergantung penilaian Majelis Pengawas Daerah setelah membentuk Majelis Pemeriksa kemudian memanggil Notaris terlapor dan memberi kesempatan untuk mengkonfrontir pengaduan.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto, SH. Pada tanggal 22 April 2008

³⁰ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH. pada tanggal 22 April 2008

Berdasarkan Pasal 71 huruf e UUN Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 74 ayat (2) UUN Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Adapun jangka waktu kesempatan membela diri diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat tidak diterima berita apapun dari notaris yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap tidak menggunakan hak hukumnya untuk membela diri. Konsekuensinya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan pemberitahuan/laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis Pengawas Daerah semata.

Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan

keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang menguatkan pembelaannya.

Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia. Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent (praduga tidak bersalah)*, bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Peradilan pidana yang digelar menjadi media pelaksanaan asas ini. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.

b. Banding Administratif

Banding administratif di dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. Perbedaannya terletak pada objek banding yang dimintakan. Banding menurut SKB adalah upaya hukum tingkat kedua yang diperuntukkan bagi notaris, setelah rangkaian procedural dan upaya pembelaan diri usia ditempuh, hal ini pulalah yang membuat banding dalam SKB perlu dipertegas perbedaannya dengan

menambahkan kata sifat administratif bukan berarti administrasi dalam pengertian PTUN melainkan kewenangan jabatan notaris yang pengaturannya diatur secara terpisah dengan administrasi pada umumnya.

Pengaturan banding administratif tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 13

- (1) Terhadap keputusan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 12, notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding administratif kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya keputusan dimaksud.
- (2) Surat-surat dan keterangan-keterangan yang menguatkan pembelaan dirinya dapat dilampirkan dalam permohonan banding administratif tersebut ayat (1).
- (3) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan banding administratif tersebut ayat (1) seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri dikirimkan pada hari itu juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tindakannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehamikan.
- (4) Apabila telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak diterima permohonan banding administratif dari notaris yang bersangkutan, maka penindakan tersebut mulai berlaku dan bersifat mengikat.
- (5) Ketua Pengadilan Negeri setelah melaporkan hal tersebut ayat (4) kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi segera setelah menerima permohonan banding administratif dan berkas penindakan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 13 dapat menguatkan, memperbaiki atau membatalkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan suatu keputusan.

- (2) Salinan keputusan tersebut ayat (1) denan segera dikirimkan dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, ketua pengadilan negeri, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Alasan pengajuan permohonan banding administratif didasarkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri. Jangka waktu permohonannya 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya keputusan penindakan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Permohonan dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkan dapat melampirkan surat-surat dan keterangan-keterangan yang dapat menguatkan pembelaan dirinya. Jika notaris tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding administratif dan telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dirimkan keputusan penindakan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka penindakan tersebut mulai berlaku dan bersifat mengikat.

Hak notaris untuk mengajukan upaya hukum berhenti di tingkat banding administratif. Selanjutnya penyelesaian masalah penindakan pada tingkat akhirnya diserahkan ke Ketua Mahkamah Agung yang berdasarkan kebijaksanaannya dapat melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian terhadap keputusan Ketua Pengadilan Tinggi yang mengadili ditingkat banding administratif. Bentuk penilaian berupa memperbaiki atau membatalkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Mengenai kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung rumusan ketentuannya diatur dalam Pasal 15 SKB.

Pasal 15

- (1) Ketua Mahkamah Agung setelah menerima salinan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi beserta seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakannya sebagaimana dimaksud Pasal 14, karena jabatannya dapat menilai kembali keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan memperbaiki atau membatalkan keputusan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung setelah lewat jangka waktu tersebut ayat (1) tidak melakukan penilaian, maka keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 14 mulai berlaku dan bersifat mengikat.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung melakukan penilaian dengan mengadakan perbaikan atau pembatalan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka hal tersebut dituangkan dalam suatu keputusan.
- (4) Salinan keputusan tersebut ayat (3) pada hari itu juga disampaikan dengan surat tercatat kepada notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Kehakiman.
- (5) Seluruh berkas yang berkaitan dengan penindakan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bersama dengan pengiriman salinan keputusan tersebut ayat (4).
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ayat (3) mulai berlaku dan bersifat mengikat pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penindakan terhadap seorang notaris bersifat mengikat dan final pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan, sekaligus mengakhiri proses penyelesaian kasus penindakan notaris.

Pada saat sekarang setelah dibentuknya Majelis Pengawas oleh Menteri maka seorang Notaris yang dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat melaksanakan banding kepada Majelis Pengawas Pusat karena keputusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final.³¹

³¹ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH. Pada tanggal 22 April 2008

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) Dalam Hal Anggotanya Dikenai Sanksi Jabatan

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.³²

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

³² R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.* hal. 1

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan kontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi misleading. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang misrepresentation, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang menyesatkan (*misleading*).

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris. Untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Sebagai konsekwensi yang logis, maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karena yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah segala hak dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur hukum yang telah ditentukan, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur.

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan dapat kita temukan rumusan implisitnya. Di katakan rumusan implisit sebab kata perlindungan dalam beberapa peraturan mengenai pelaksanaan jabatan notaris memang tidak disebutkan secara gamblang.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat, setelah berlakunya UUJN maka pengawas terhadap Notaris di bawah naungan langsung Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.³³

Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan

³³ Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : 2007), hal. 20

etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generalis.

Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya Majelis Pengawas, maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu “Peradilan Profesi Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. Dengan adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas ada sekitar 50 (limapuluh) Notaris praktek di Wilayah Kota Semarang yang telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan sehubungan dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak yang berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum baik sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum dikarenakan adanya keragu-raguan pihak pemohon (pihak yang mengajukan permohonan pemanggilan) mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan tentunya mengharap adanya kesaksian dari Notaris tersebut.

Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun

³⁴ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH. Pada tanggal 22 April 2008

surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum.³⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak terdapat kata “Perlindungan Hukum”, namun demikian dengan di undangkannya UUJN tersebut memberikan pengayoman yang lebih baik terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya secara profesional. Masalah yang dihadapi Notaris dalam menjalankan profesinya, adalah ketidakcermatan dan ketidaktahuan mengenai apa yang dilakukan sudah tahu tetapi tetap dilakukannya juga dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan sanksi yang akan dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil 2 (dua) Notaris sebagai responden yang pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang. Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa Notaris AB³⁶ yang dipanggil oleh pihak penyidik kepolisian mulai dari status saksi sampai dengan status tersangka, Pasal yang disangkakan kepada Notaris AB adalah Pasal 372 KUHP tentang penipuan.

Kasus tersebut berawal ketika terjadi kesepakatan hutang-piutang antara tuan X dan tuan Y senilai Rp. 350.000.000,- dengan jaminan sebuah sertifikat hak atas tanah milik tuan Y. Selanjutnya tuan X dan tuan Y sepakat untuk datang menghadap Notaris AB di Semarang (oleh karena domisili tuan X di Semarang sedangkan tuan Y di luar Kota Semarang), namun

³⁵ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH. Pada tanggal 22 April 2008

³⁶ Dalam penelitian ini penulis sengaja tidak menyebutkan nama, hal ini berkaitan dengan kredibilitas Notaris yang bersangkutan.

kesepakatan tersebut disampaikan oleh tuan X dan tuan Y kepada Notaris AB bukan hutang-piutang melainkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli. Atas keterangan tersebut, maka Notaris AB membuatkan aktanya.

Selanjutnya dikemudian hari ternyata tuan Y tidak bisa melunasi hutangnya kepada tuan X, sehingga timbul masalah yang pada akhirnya tuan X melaporkan tuan Y ke pihak kepolisian, dalam pemeriksaan oleh penyidik ditanyakan dasar hukum perjanjian hutang-piutang antara tuan X dan tuan Y yang pada akhirnya mengarah ke akta yang dibuat oleh Notaris AB. Dengan demikian Notaris AB juga dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut, yang tentunya pemanggilan tersebut harus seijin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Selanjutnya dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak kepolisian, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang memanggil Notaris AB dan tuan Y untuk di klarifikasi keterangannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang menentukan apakah Notaris AB diijinkan untuk memenuhi panggilan pihak penyidik atau tidak.

Dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang ternyata tidak ditemukan pelanggaran oleh Notaris AB, sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang

memutuskan tidak memberikan ijin kepada Notaris AB untuk dipanggil oleh penyidik.

Namun ternyata tuan Y melaporkan Notaris AB kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan, karena tuan Y sebagai klien tidak mendapatkan salinan dari akta Pengikatan Jual-Beli antara tuan X dan tuan Y. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku para pihak diberikan salinan dari akta tersebut, tentunya hak dari Notaris AB juga harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUJN tentang honorarium. Namun ternyata hak tersebut tidak dipenuhi, sehingga Notaris AB tidak memberikan salinan akta sampai haknya sebagai Notaris dipenuhi. Setelah menjalani proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, akhirnya perselisihan antara tuan Y dengan Notaris AB dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak tuan Y membuat surat pernyataan bermaterai bahwa masalah ini telah selesai dan bersedia mencabut laporannya.

Namun demikian pihak penyidik menganggap masalah tersebut belum selesai, dengan alasan Notaris AB tidak memenuhi panggilan penyidik. Alasan tersebut sebenarnya mengada-ada karena dengan tidak diijinkannya Notaris AB oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, maka Notaris AB tidak memenuhi panggilan dan dengan dicabutnya laporan seharusnya masalah tersebut telah selesai.

Dalam kasus ini Notaris AB dalam pemeriksaan oleh penyidik dengan status sebagai saksi sampai dengan status tersangka. Menurut penulis alasan

penyidik sangat klise dan sudah menjadi rahasia umum karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ternyata alasan penyidik menganggap masalah belum selesai karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya sehingga tidak mendapat "bagian".

Contoh lain, kasus yang menimpa Notaris S. Notaris S dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh klien-nya dengan tuduhan melakukan Pasal 372 KUHP tentang penipuan. Kasus tersebut berawal dari Nyonya X yang mengajukan kredit pada Bank Z dengan jaminan sertipikat tanah milik pihak ketiga. Pada waktu jatuh tempo pelunasan ternyata Nyonya X belum bisa melunasi hutang tersebut, sehingga atas prakarsa pihak bank selaku kreditor menganjurkan untuk dilakukan perpanjangan masa kredit dan hal tersebut juga telah diterima Nyonya X selaku debitor.

Pada waktu masa perpanjangan juga telah habis, ternyata Nyonya X juga belum bisa melunasi hutangnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak bank dilakukan eksekusi benda jaminan. Pelaksanaan eksekusi tersebut ternyata tidak bisa diterima oleh Nyonya X, sehingga dia melaporkan pihak Bank Z dan Notaris S (yang membuat akta perjanjiannya) kepada pihak Kepolisian dengan tuduhan penipuan. Bahkan dalam laporannya, Nyonya X menyangkal tanda tangan yang terdapat akta perjanjian.

Dalam melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, pihak Kepolisian memanggil Notaris S sebagai terlapor, termasuk memeriksa minuta akta untuk memcocokkan apakah tanda tangan Nyonya X asli atau palsu.

Berkaitan dengan kasus tersebut, pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) memberikan ijin kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris S. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan pemeriksaan minuta akta yang ada pada Notaris S, meskipun sebenarnya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak perlu memberi ijin oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Notaris S telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengijinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam mensikapi berbagai persoalan kasus yang menimpa para Notaris khususnya di Kota Semarang, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang selalu sangat berhati-hati dalam menangani kasusnya dan akan memberikan solusi yang terbaik dan bijaksana. Tidak semua laporan atau panggilan diterima dengan mengatakan ya atau tidak, akan tetapi masih perlu dicarikan data-data yang lengkap dan akurat mengenai persoalan yang ada tentang benar dan salahnya. Dengan demikian Majelis

Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang tidak bekerja secara serampangan dan tidak profesional serta tidak proporsional dalam menangani kasus yang menimpa Notaris.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam upaya penegakkan hukum terhadap Notaris tidak selamanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dari bermacam-macam hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, justru hambatan paling banyak datang dari pihak Notrais yang bersangkutan. Hal ini menyulitkan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) untuk mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) mengambil keputusan yang justru merugikan Notaris yang sedang terkena masalah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, tidak tertutup kemungkinan adanya campur tangan organisasi dalam hal ini Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) untuk memohon “ampuan” atas Notaris yang bersangkutan. Hal ini tentunya wajar sebagai wujud dari perlindungan organisasi terhadap anggotanya, selama masih dalam batas kewajaran. Namun hal yang disayangkan adalah sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, Notaris tersebut langsung menghadap Majelis

³⁷ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH. Pada tanggal 22 April 2008

Pengawas Wilayah (MPWN) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) bahkan langsung ke pihak penyidik tanpa mekanisme yang jelas.

Dalam kaitan pemanggilan Notaris oleh penyidik, perlu diingat tentang Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah ditanda-tangani pada tanggal 9 Mei 2006. Dalam MoU tersebut ditekankan, bahwa setiap pemanggilan Notaris oleh penyidik harus seizin Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga penyidik mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek tidak boleh memanggil Notaris tanpa izin Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Apabila Pihak penyidik akan memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, maka penyidik harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan terhadap Notaris, baik sebagai saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitannya dengan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta oetentik oleh Notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

Sebenarnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan penyempurnaan dari kesepakatan sebelumnya, sehingga dengan penandatanganan kesepakatan tersebut akan memberikan manfaat pengayoman bagi anggota Ikatan Notaris

Indonesia (INI) karena pengayoman akan memberikan perlindungan bagi para anggotanya.³⁸

Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka tidak ada alasan bagi penyidik kepolisian dengan mudah apalagi seenaknya memanggil, memeriksa dan/atau menyita minuta akta.

Selain itu, menurut penulis pentingnya pemahaman yang sama antara Notaris dengan institusi lain dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi adanya perbedaan pandangan yang muncul dalam penafsiran atas dasar kepentingan tugas dan fungsi institusi atau lembaga agar tidak melakukan kesalahan penafsiran dari pengertian suatu undang-undang.

Pada dasarnya dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, sehingga Notaris dalam menjalankan profesinya bisa dilindungi ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik kepolisian.

Dengan adanya permohonan ijin pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, maka selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam sidangnya berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan dan data-data yang diberikan, digunakan oleh MPD sebagai bahan pertimbangan untuk

³⁸ Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1.37.IV Juni 2006, Hal. 9

menjawab surat panggilan penyidik. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b UUJN tentang kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang menyatakan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) setempat dengan tembusan Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).”

Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa hal-hal apa yang mendasari keputusan MPD untuk menentukan keputusannya. Apabila Notaris yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan MPD tiga (3) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka MPD akan menyerahkan kepada pihak penyidik.³⁹

Norma umum yang menjadi landasan normatif kebijakan perlindungan bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia yang dikenai sanksi-sanksi jabatan sesungguhnya lebih didasarkan pada garis-garis besar kebijakan organisasi/perkumpulan, yakni Anggaran Dasar.

Pemberian perlindungan kepada anggota, diletakkan dalam kerangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat notaris selaku pejabat umum, sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan. Nilai-nilai ini merupakan *grund norm* yang menjiwai isi Anggaran Dasar INI.

³⁹ Wawancara dengan Ketua MPD Kota Semarang Bapak Suyanto,SH Pada tanggal 22 April 2008

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perhimpunan para notaris, kepada para anggota perkumpulan memberikan jaminan perlindungan, seperti tertuang dalam rumusan Pasal 5 ayat (4) bagian a Anggaran Dasar Perkumpulan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (4) bagian a

Selain hak yang terurai dalam ayat diatas setiap anggota berhak juga untuk :

- a. Mendapatkan perlindungan dari perkumpulan sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pengurus sebagai badan pelaksana mandat perkumpulan membentuk departemen-departemen yang ditugaskan untuk mengelola dan menjalankan tugas-tugas khusus. Secara struktural dalam kepengurusan INI terdapat 10 Departemen yang membantu ketua dan wakil ketua menjalankan roda pemerintahan perkumpulan. Ke-10 departemen tersebut ialah :

1. Departemen/Bidang Hubungan Luar Negeri;
2. Departemen/Bidang Hubungan Antar Lembaga;
3. Departemen/Bidang Organisasi;
4. Departemen/Bidang Pembinaan;
5. Departemen/Bidang Pendidikan;
6. Departemen/Bidang Kajian Hukum;
7. Departemen/Bidang Dana Dan Usaha;
8. Departemen/Bidang Kesejahteraan Anggota;

9. Departemen/Bidang Hubungan Masyarakat;

10. Departemen/Bidang Pengayoman.

Departemen yang membidangi perlindungan anggota diserahkan kepada Departemen/Bidang Pengayoman.

Departemen pengayoman berdasarkan dokumen hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-VIII di Bandung tanggal 22-25 Januari 2003, keputusan sidang komisi B yang menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) periode 2003-2006, bertugas memberikan bantuan konsultasi hukum kepada anggota yang sedang menghadapi masalah hukum *apabila ia memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap organisasi*. Tugas ini dijalankan dengan menggunakan metode pendekatan (*method of approach*) ekstern dan intern. Pendekatan secara intern dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum ataupun menyampaikan informasi peraturan-peraturan baru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh organisasi yang disebut Kode Etik. Pendekatan ekstern dengan memberikan bantuan hukum kepada anggota yang terkait kasus berupa tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anggota, adalah model *perlindungan bersyarat*. Bidang Pengayoman PP-INI hanya akan memberikan bantuannya kepada anggota yang bermasalah, sepanjang ia memang adalah anggota aktif INI dan anggota tersebut selama dalam

masa keanggotaannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap organisasi”.

Bentuk perlindungan dari INI terhadap anggotanya yang dikenai sanksi jabatan, salah satunya adalah pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas.⁴⁰

Kategori anggota aktif anggota yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap organisasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga INI.

Pasal 4

1. Anggota perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
2. a. Setiap notaris termasuk di dalamnya yang telah diangkat sebagai Notaris, akan tetapi belum mengucapkan sumpah jabatan dengan sendirinya menjadi Anggota Biasa.
 - b. Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 2 (a) di atas, setiap Notaris diharuskan mengisi formulir data anggota yang disediakan oleh Pengurus Cabang dari tempat kedudukannya.
 - c. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima formulir dari anggota yang telah diisi dan ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan, Pengurus Cabang mencatat dan mengirimkan data anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah.
 - d. Apabila kemudian ternyata Notaris yang telah diangkat, akan tetapi belum mengucapkan sumpah jabatan seperti yang dimaksud dalam ayat 2 (a) di atas, tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan, dalam jangka waktu yang ditentukan untuk itu, maka ia dianggap sebagai tidak pernah menjadi Anggota Biasa dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 5 di bawah ini untuk dapat menjadi Anggota Luar Biasa.
1. Seorang Notaris yang semula berstatus Anggota Biasa, dengan sendirinya menjadi Anggota Luar Biasa terhitung sejak tanggal ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Karena telah

⁴⁰ Wawancara dengan anggota INI Bapak Hari Bagyo,SH.MHum. Pada tanggal 22 April 2008

- mencapai batas umur untuk dipensiunkan, atau atas permintaan sendiri.
2. a. Seorang yang diangkat sebagai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dengan sendirinya menjadi anggota Luar Biasa terhitung sejak tanggal pengangkatannya.
b. Apabila kemudian ternyata ia tidak pernah mengucapkan sumpah jabatannya dalam jangka waktu yang ditentukan untuk itu, maka dianggap tidak pernah menjadi anggota Luar Biasa.
c. Wakil Notaris atau Wakil Notaris Sementara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, baik karena telah mencapai batas umur untuk dipensiunkan, atau atas permintaan sendiri, atau karena alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak lagi dapat menjadi anggota Luar Biasa, kecuali Kandidat Notaris.
 3. a. Seorang Kandidat Notaris dapat menjadi Anggota Luar Biasa dengan mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Cabang dari daerah tempat tinggalnya, yang selanjutnya meneruskan permohonan itu disertai rekomendasinya kepada Pengurus Daerah.
b. Pengurus Daerah memberi keputusan atas permohonan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima permohonan tersebut.
 4. Pengurus Cabang memberikan kartu tanda anggota luar biasa kepada notaris yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan kepada Wakil Notaris Sementara dan Kandidat Notaris, setelah dipenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
 5. Anggota kehormatan adalah seorang yang diangkat untuk itu oleh Kongres atau usul Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap perkumpulan.
 6. Dalam hal anggota bisa pindah alamat kantor dan/atau tempat kedudukannya, maka yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis tentang kepindahannya itu kepada :
 - a. Pengurus Cabang yang lama dan yang baru;
 - b. Pengurus Daerah yang lama dan yang baru;
 - c. Pengurus Pusat.
 7. Pengurus Pusat mengeluarkan kartu tanda anggota pelaksanaanya diserahkan kepada Pengurus Cabang yang dikoordinir oleh Pengurus Daerah menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 6

1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi dan menaati ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan.
2. Setiap Anggota Biasa wajib menjalankan jabatannya secara aktif dan nyata.
 3. Setiap Anggota Biasa yang ingin mengajukan permohonan pindah wilayah kerja dan setiap Anggota Luar Biasa (kecuali mantan Notaris) yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris, wajib memperoleh rekomendasi lebih dahulu dari Pengurus Pusat, apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Pengurus Pusat wajib memberikan rekomendasi.
 4. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
 5. Setiap anggota kecuali mantan Notaris dan anggota Kehormatan, membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

Syarat pemberian perlindungan anggota itu berlaku secara akumulatif, artinya syarat-syarat tersebut berlaku sekaligus dan menjadi ukuran standar kelayakan pemberian perlindungan. Dari hasil pemeriksaan dan penilaian berkas anggota, sebagai ukuran kelayakan pemberian perlindungan, selanjutnya pengurus akan memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan tindakan pemberian perlindungan berupa bantuan hukum dan konsultasi hukum. Bantuan dan konsultasi hukum ini akan disampaikan kepada anggota yang bermasalah itu secara non formal. Pemeriksaan dan penilaian berkas dilakukan secepatnya.

Kebijakan PP-INI yang membatasi pemberian perlindungan hanya kepada mereka, notaris yang berhimpun dalam organisasi/perkumpulan INI dan secara administratif merupakan anggota INI serta melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang diamanahkan oleh Anggaran Rumah

Tangga, konsekuensinya logis dari keanggotaannya, menurut hemat penulis adalah tepat dan sungguh logis. Terdapat beberapa alasan penulis menyetujui pembatasan itu, yakni :

Anggota INI yang kepadanya dijatuhkan putusan sanksi Peraturan Jabatan Notaris, baik putusan pidana berupa denda (*Boete*), putusan perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga maupun putusan administratif berupa kehilangan jabatan (*ambsverbeurte*), pemecatan sementara (*Schorsing*) dan pemecatan (*Ontzetting*) dapat mengkonsultasikan permasalahan yang tengah dihadapinya kepada pengurus Ikatan Notaris Indoensia. Keterlibatan INI khususnya departemen/Bidang Pengayoman di tiap-tiap permasalahan hukum yang menyangkut salah satu anggota di tingkat peradilan di mana hakim meminta salah satu wakil dari pengurus INI untuk didengar pendapatnya mengenai permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya. Di pengadilan kehadiran wakil pengurus ini sebagai saksi ahli.

Kiprah departemen/bidang pengyoman INI terlihat begitu memainkan peran penting dalam tiap-tiap kasus yang melibatkan notaris sebagai tergugat maupun tersangka di setiap kasus yang dimajukan ke hadapan hakim di pengadilan. Selain mengemban fungsi konsultatif dan keterlibatannya di pengadilan sebagai saksi ahli yang ikut andil membantu penyelesaian kasus. INI Juga memainkan peran besar memberikan pendapat beserta saran kepada Menteri Kehakiman pada peradilan administratif. Pendapat itu dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk

menindak seorang notaris berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 20 SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris. Mengenai bentuk keterlibatannya dapat dilihat dengan jelas pada pasal yang dimaksud sebagai berikut :

Pasal 20

1. Menteri Kehakiman sebelum mengambil keputusan dapat mendengar terlebih dahulu pendapat dari organisasi profesi
2. Apabila setelah mempertimbangkan pembelaan dari notaris yang bersangkutan, pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan pendapat dari organisasi-organisasi profesi, Menteri Kehakiman berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, maka hal itu disampaikan dengan surat tercatat kepada Ketua Mahkamah Agung, yang tindakannya disampaikan dengan surat tercatat kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan Notaris yang bersangkutan.
3. Apabila Menteri Kehakiman setelah mempertimbangkan sedalam-dalamnya berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai notaris.
4. Salinan keputusan Menteri Kehakiman tersebut ayat (3) disampaikan dengan surat tercatat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan Notaris yang bersangkutan.

Logika di balik pelibatan INI memberikan pendapat kepada Menteri Hukum dan HAM yang hendak menindak seorang notaris di dasarkan pada asumsi-asumsi :

1. Memperkaya bahan pertimbangan keputusan penindakan terhadap seorang notaris.

2. Menambah kekayaan perspektif / cara pandang keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap kasus administratif yang hendak diselesaikan, sekaligus menghindarkan keputusan dari tudingan kurang beralasannya suatu keputusan.
3. Keputusan haruslah mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari uraian pembahasan pada BAB IV dan menjadi inti keseluruhan penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Semarang dapat terlaksana dengan baik dalam arti setiap Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap

putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat sebagai banding tingkat akhir karena putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final.

2. Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sedangkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) kepada anggotanya dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan berbentuk perlindungan bersyarat dalam arti Bidang Pengayoman PP-INI akan memberikan bantuan sepanjang Notaris yang dikenai sanksi jabatan tersebut adalah anggota aktif INI yang selama dalam masa keanggotaannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap organisasi, selain itu PP-INI juga memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas.

B. Saran

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memahami dan

melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris.

2. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan terhadap Notaris, hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Kohar, ***Notaris Berkomunikasi***, (Bandung : Alumni, 1984)
- Bambang Poernomo, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997)
- Budi Untung, ***Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia***, (Yogyakarta : Andi, 2005)
- G.H.S Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, (Jakarta : Erlangga, 1999)
- Herlina Suyati Bachtiar, ***Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku I***, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001)
- _____, ***Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku II Bagian I***, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001)
- _____, ***Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku II Bagian II***, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001)
- I.G. Rai Widjaya, ***Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek***, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002)
- Komar Andasasmita, ***Notaris II***, (Bandung : Sumur, 1982)
- Liliana Tedjosaputro, ***Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana***, (Yogyakarta : Bigraf, 1995)
- Muhammad Adam, ***Ilmu Pengetahuan Notariat***, (Bandung : Sinar Baru, 1984)
- NG. Yudara, ***Notaris dan Permasalahanya***, Makalah disampaikan pada Kongres INI pada tanggal 25 Januari 2006 di Jakarta.

- Nico, ***Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum***, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)
- Ronny Hanitijo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, (Jakarta : Ghalia, 1999)
- Refik Isa Beekum, ***Etika Bisnis Islami***, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)
- R Soegondo Notodisoerjo, ***Hukum Notariat di Indonesia***, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993)
- Soedharyo Soimin, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Soemardjono S. W Maria, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar***, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, (Jakarta : Indonesia University Press, 1986)
- Suhrawardi Lubis K, ***Etika Profesi Hukum***, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
- Sujamto, ***Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia***, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
- Sutrisno Hadi, ***Metodologi Research Jilid 1***, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000)
- S. Nasution, ***Metode Penelitian Kualitatif***, (Bandung : Tarsito, 1992)
- Tan Thong Kie, ***Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I***, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- _____, ***Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku II***, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, ***Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah***, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
- Widiatmoko, ***Himpunan Peraturan Jabatan Notaris***, (Jakarta : 2007)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

Surat Keputusan Bersama Nomor KMA/006/SKB/VII/1987_No. : M.04-
PR.08.05 Tahun 1987 tentang ***Tata Cara Pengawasan,
Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris***

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-
01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang ***Kenotarisan***

C. ARTIKEL

Habib Adjie, ***Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai
Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris***, (Renvoi, 28
September 2005)

Malaba A Irsyadul, Artikel : ***Menyoal Ketentuan Magang Kepmenkeh
No. 1 tahun 2003***, (WWW.Hukumonline.Com)

Majalah ***Renvoi*** Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 3 Juni 2006

Majalah ***Renvoi*** Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 3 Januari 2006

D. INTERNET

www.hukumonline.com

www.theceli.com

www.indoregulation.com

www.legalitas.org

